

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya sehingga makalah yang berjudul "**Kerajaan Feodal di Eropa**" ini dapat diselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penulisan makalah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih dalam mengenai sistem feodalisme yang berkembang di Eropa, khususnya pada masa Abad Pertengahan, serta dampaknya terhadap kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat Eropa kala itu.

Dalam proses penyusunan makalah ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, baik secara langsung maupun tidak langsung, dari berbagai pihak.

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, segala bentuk kritik dan saran yang membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa mendatang.

Akhir kata, semoga makalah ini dapat memberikan manfaat dan menambah wawasan bagi pembaca, khususnya dalam memahami dinamika sistem pemerintahan feodal di Eropa serta pengaruhnya dalam perkembangan sejarah dunia.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	2
C. Tujuan.....	2
BAB II. PEMBAHASAN	3
A. Pengertian Feodalisme.....	
B. Ciri-ciri Kerajaan Feodal.....	
C. Perkembangan Feodalisme di Eropa Barat.....	
D. Dampak Feodalisme terhadap Kehidupan Masyarakat.....	
BAB III. PENUTUP	13
A. KESIMPULAN.....	13
DAFTAR PUSTAKA	14

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Periode Abad Pertengahan atau *Middle Ages* di Eropa, yang berlangsung kurang lebih dari abad ke-5 hingga abad ke-15 M, dikenal sebagai masa yang ditandai oleh sistem pemerintahan dan tatanan sosial yang khas, yaitu feodalisme. Sistem inilah yang runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada tahun 476 M, yang menyebabkan terjadinya kekosongan kekuasaan dan ketidakstabilan politik di sebagian besar wilayah Eropa. Dalam kekosongan ini, muncul berbagai kerajaan kecil yang berusaha mengatur wilayah dan rakyatnya melalui sistem pertukaran tanah dengan kesetiaan dan pelayanan militer (Bloch, 1961).

Feodalisme bukan hanya sistem politik, melainkan juga mencerminkan struktur sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat Eropa saat itu. Hubungan antara raja, bangsawan, kesatria, dan petani bersifat hierarkis dan didasarkan pada sumpah setia serta kewajiban timbal balik. Raja sebagai penguasa tertinggi memberikan tanah (*fief*) kepada para bangsawan atau *lord*, dan sebagai balasannya, bangsawan tersebut wajib menyediakan prajurit dan dukungan politik (Ganshof, 1996). Tanah bukan hanya aset ekonomi, melainkan juga simbol kekuasaan dan sumber legitimasi politik.

Dalam sistem ini, kaum petani berada di lapisan terbawah, seringkali menjadi *serf* (petani terikat) yang tidak memiliki kebebasan berpindah dan terikat secara turun-temurun pada tanah serta tuannya. Mereka harus menyerahkan sebagian hasil pertanian sebagai pajak atau upeti kepada bangsawan pemilik tanah. Struktur ini menyebabkan ketimpangan sosial yang tajam namun juga memberikan stabilitas sosial dalam jangka panjang (Tierney & Painter, 1992).

Perkembangan kerajaan feodal di Eropa juga tidak lepas dari pengaruh Gereja Katolik, yang pada masa itu memiliki kekuatan spiritual dan politik yang besar. Gereja sering kali menjadi penengah antara para bangsawan atau bahkan ikut campur dalam urusan pemerintahan. Dukungan dari Gereja juga diperlukan untuk melegitimasi kekuasaan raja, sehingga aliansi antara gereja dan penguasa feodal menjadi salah satu pilar utama dalam sistem ini (Hilton, 1973).

Di samping itu, sistem feodal membentuk dasar bagi perkembangan struktur militer dan pertahanan di Eropa. Karena tidak adanya pasukan nasional, setiap bangsawan harus menyediakan pasukan sendiri untuk mempertahankan wilayahnya. Maka

dari itu, munculnya kastaksatria (*knights*) menjadi bagian integral dari sistem ini, dan kode etik kesatria atau *chivalry* berkembang sebagai norma sosial dan budaya (Brown, 1998).

Secara historis, sistem feodal memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan politik Eropa.

Bahkan ketika feodalisme mulai meredup seiring munculnya monarki absolut dan negara bangsa pada akhir Abad Pertengahan, warisan sistem ini tetap terasah dalam pembentukan negara-negara modern di Eropa. Oleh karena itu, penting untuk memahami sistem kerajaan feodal ini guna menelusuri akar dari struktur politik dan sosial yang berkembang kemudian.

Melalui makalah ini, penulis ingin mengkaji secara mendalam bagaimana sistem kerajaan feodal terbentuk, bagaimana ia memengaruhi kehidupan sosial masyarakat, dan apa dampak jangka panjangnya bagi Eropa. Dengan memahami feodalisme, kita dapat menelusuri perjalanan sejarah Eropa secara lebih komprehensif serta menilai warisan budaya dan sistem pemerintahan masa lalu yang masih berpengaruh hingga kini.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Apa Pengertian Feodalisme ?
2. Apa Ciri-ciri Kerajaan Feodal ?
3. Bagaimana Perkembangan Feodalisme di Eropa Barat ?
4. Apa Dampak Feodalisme terhadap Kehidupan Masyarakat ?

C. TUJUAN

1. Untuk mengetahui Apa Pengertian Feodalisme
2. Untuk mengetahui Apa Ciri-ciri Kerajaan Feodal
3. Untuk mengetahui Bagaimana Perkembangan Feodalisme di Eropa Barat
4. Untuk mengetahui Apa Dampak Feodalisme terhadap Kehidupan Masyarakat

BAB II

PEMBAHASAN

A. PENGERTIAN FEODALISME

Feodalisme merupakan sistem sosial, ekonomi, dan politik yang berkembang di Eropa selama Abad Pertengahan, terutama antara abad ke-9 hingga ke-15. Kata *feodalisme* berasal dari istilah Latin "*feodum*" atau "*feudum*", yang berarti tanah atau wilayah kekuasaan. Dalam sistem ini, kepemilikan dan pengelolaan tanah menjadi dasar dari kekuasaan politik dan hubungan sosial (Bloch, 1961).

Menurut Marc Bloch, seorang sejarawan terkemuka dalam studi tentang Eropa abad pertengahan, feodalisme adalah suatu bentuk organisasi sosial yang berlandaskan pada hubungan antara tuan tanah (*lord*) dan bawahannya (*vassal*), yang terikat oleh sumpah kesetiaan dan pertukaran pelayanan militer atau jasa lainnya dengan pemberian tanah atau hak istimewa lainnya (Bloch, 1961). Hubungan ini bersifat pribadi dan hirarkis, di mana setiap lapisan sosial memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap lapisan di atasnya.

Francois-Louis Ganshof mempersempit definisi feodalisme dengan fokus pada aspek hukum dan militer. Menurutnya, feodalisme adalah sistem di mana seseorang yang lebih lemah (*vassal*) menerima perlindungan dan tanah dari pihak yang lebih kuat (*lord*) dengan imbalan kesetiaan dan pelayanan, terutama dalam bentuk militer (Ganshof, 1996). Definisi ini lebih teknis dan melihat feodalisme sebagai hubungan kontraktual yang bersifat legal-formal.

Namun, pendekatan yang lebih luas dikemukakan oleh sejarawan seperti Perry Anderson dan Rodney Hilton, yang memandang feodalisme sebagai keseluruhan struktur ekonomi dan sosial, termasuk dominasi kelas pemilik tanah atas para petani penggarap (*serf*), pengendalian produksi oleh kaum aristokrat, serta keterbatasan mobilitas sosial dan politik masyarakat bawah (Hilton, 1973).

Salah satu ciri utama feodalisme adalah *desentralisasi kekuasaan*. Setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi, Eropa menjadi wilayah yang terfragmentasi dan tidak stabil. Tidak ada otoritas pusat yang kuat, sehingga kekuasaan terdistribusi ke para bangsawan lokal yang mengelola wilayah mereka sendiri. Para penguasa lokal ini memiliki kewenangan penuh atas hukum, perpajakan, dan pertahanan wilayahnya. Dalam banyak kasus, raja hanyalah simbol dan tidak memiliki kekuasaan nyata atas seluruh wilayah kerajaannya (Tierney & Painter, 1992).

Selain itu, feodalisme juga ditandai oleh sistem pertukaran berbasis tanah. Tanah dianggap sebagai sumber utama kekayaan dan kekuasaan. Pemilik tanah memiliki kontrol atas hasil produksi pertanian serta hak atas tenaga kerja petani yang tinggal di atas tanah tersebut. Para petani tidak memiliki tanah secara pribadi dan harus memberikan bagian dari hasil kerja mereka kepada tuan tanah, serta tunduk pada kewajiban kerja paksa (Brown, 1998).

Feodalisme juga memiliki dimensi budaya dan ideologis yang kuat. Konsep *chivalry* atau kode etik kesatria, loyalitas, serta ikatan kehormatan antara penguasa dan bawahan sangat dijunjung tinggi. Gereja Katolik memainkan peran besar dalam mendukung struktur ini, baik melalui legitimasi spiritual maupun perannya dalam pendidikan, hukum, dan moralitas masyarakat (Tierney & Painter, 1992).

Dengan demikian, feodalisme bukan hanya sistem pemerintahan, tetapi juga sistem kehidupan secara menyeluruh. Ia membentuk struktur sosial yang kaku, menentukan status seseorang sejak lahir, dan menetapkan hubungan antara manusia berdasarkan kekuasaan, ketergantungan, serta hak atas tanah.

B. CIRI-CIRI KERAJAAN FEODAL

Kerajaan feodal adalah bentuk pemerintahan yang khas berkembang di Eropa selama Abad Pertengahan, ditandai oleh struktur kekuasaan yang hierarkis dan relasi sosial yang berbasis kepemilikan tanah serta kesetiaan pribadi. Berikut adalah ciri-ciri utama dari kerajaan feodal yang menandai struktur sosial, ekonomi, politik, dan budaya masyarakat pada masa tersebut:

1. Kekuasaan Terdesentralisasi

Salah satu ciri utama kerajaan feodal adalah desentralisasi kekuasaan. Tidak seperti negara-negara modern yang memiliki pemerintahan pusat yang kuat, kerajaan feodal bersifat fragmentaris. Raja hanya memiliki kekuasaan nominal, sementara kekuasaan nyata berada di tangan para bangsawan atau *lord* yang menguasai wilayah-wilayah tertentu. Masing-masing lord menjalankan hukum sendiri, memiliki pasukan pribadi, dan bahkan bisa memungut pajak (Ganshof, 1996).

2. Kepemilikan Tanah Sebagai Sumber Kekuasaan

Dalam sistem feodal, tanah merupakan sumber utama kekuasaan, kekayaan, dan status sosial. Raja membagikan tanah kepada bangsawan sebagai bentuk penghargaan atas kesetiaan atau jasa militer. Tanah yang diberikan disebut *fief*, dan penerimanya disebut

vassal. Para vassal kemudian mengelola tanah tersebut, memungut pajak dari petani, dan wajib memberikan bantuan militer kepada tuannya jika diminta (Bloch, 1961).

3. Hubungan Timbal Balik antara Lord dan Vassal

Sistem feodal dibangun atas dasar hubungan timbal balik atau kontrak personal antara lord dan vassal. Vassal berjanji setia kepada lord melalui sumpah (*oath of fealty*) dan berkomitmen memberikan pelayanan militer serta dukungan politik. Sebagai imbalannya, lord memberikan perlindungan dan sebidang tanah. Hubungan ini bersifat pribadi dan turun-temurun, bukan administratif seperti dalam sistem pemerintahan modern (Tierney & Painter, 1992).

4. Kelas Sosial yang Kaku dan Hierarkis

Kerajaan feodal memiliki struktur masyarakat yang kaku dan bertingkat, terdiri dari raja, bangsawan, kesatria, dan petani (terutama serf). Mobilitas sosial hampir tidak ada. Setiap orang lahir ke dalam kelas tertentu dan menjalani hidupnya sesuai peran tersebut. Serf tidak memiliki hak atas tanah dan terikat pada tanah serta tuannya secara turun-temurun (Hilton, 1973).

5. Ketergantungan Petani kepada Tuan Tanah

Para petani, terutama serf, sangat bergantung pada tuan tanah untuk perlindungan dan akses terhadap lahan pertanian. Sebagai imbalannya, mereka harus membayar upeti, melakukan kerja paksa, atau menyumbangkan hasil panen. Kehidupan mereka sangat terbatas, dan mereka tidak memiliki hak politik atau pun kebebasan berpindah tempat (Brown, 1998).

6. Peran Gereja Sangat Dominan

Gereja Katolik memegang peranan penting dalam legitimasi kekuasaan feodal. Gereja tidak hanya menjadi otoritas spiritual, tetapi juga memiliki tanah luas, mengelolai pendidikan, dan menetapkan norma moral masyarakat. Banyak bangsawan menyerahkan tanah kepada Gereja demi keselamatan jiwa, menjadikan Gereja salah satu tuan tanah terbesar pada masa itu (Tierney & Painter, 1992).

7. Militerisasi Masyarakat

Karena tidak adanya tentara nasional, kerajaan feodal sangat mengandalkan kesatria sebagai pasukan perang. Para kesatria ini berasal dari kalangan bangsawan dan dilatih sejak kecil dalam seni perang dan kode etik *chivalry*. Setiap lord memiliki pasukan pribadi yang siap membantu raja atau bertempur demi kepentingan pribadi maupun regional (Ganshof, 1996).

8. Sistem Peradilan Lokal

Setiap wilayah kekuasaan lord memiliki sistem hukum dan peradilan sendiri. Tuan tanah berfungsi sebagai hakim, dan masyarakat di bawahnya harus tunduk pada hukum yang ditetapkan oleh penguasa lokal. Ini menyebabkan ketimpangan dalam penegakan hukum karena hukum tidak berlaku secara universal dan cenderung bias terhadap kepentingan bangsawan (Bloch, 1961).

Ciri-ciri di atas menunjukkan bahwa kerajaan feodal merupakan sistem yang kompleks dan menyeluruh, melibatkan relasi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang saling berkelindan. Meskipun memberikan stabilitas dalam kondisi pasca-Romawi yang kacau, sistem ini pada akhirnya menciptakan ketimpangan sosial yang sangat besar. Ciri-ciri ini menjadi fondasi untuk memahami bagaimana tatanan sosial Eropa berkembang selama berabad-abad.

C. PERKEMBANGAN FEODALISME DI EROPA BARAT

Feodalisme merupakan sistem sosial, politik, dan ekonomi yang mendominasi Eropa Barat dari sekitar abad ke-9 hingga abad ke-15. Feodalisme berkembang sebagai tanggapan atas keruntuhan Kekaisaran Romawi dan kebutuhan masyarakat akan perlindungan serta stabilitas dalam kondisi sosial-politik yang kacau. Perkembangan feodalisme di Eropa Barat mengalami beberapa fase penting, dimulai dari fase awal pembentukan, puncak kejayaan, hingga perlahan-lahan mengalami kemunduran seiring munculnya negara-negara modern.

1. Latar Belakang Perkembangan Feodalisme

Setelah runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat pada abad ke-5 Masehi, Eropa mengalami kekacauan politik dan seringnya invasi dari bangsa-bangsa barbar seperti Viking, Magyar, dan Saracen. Kekuasaan pusat melemah, dan rakyat tidak memiliki perlindungan yang cukup. Dalam konteks inilah lahir sistem feodal, di mana rakyat yang lemah meminta perlindungan kepada bangsawan lokal dengan memberikan kesetiaan dan kerja sebagai gantinya (Bloch, 1961).

2. Awal Mula Feodalisme

Feodalisme mulai berkembang pada abad ke-9, terutama di wilayah Prancis di bawah pemerintahan Dinasti Karoling. Raja Charlemagne (Karel Agung) membagi wilayah kekaisarannya kepada para bangsawan setiadalam bentuk tanah atau *beneficium*. Sistem ini kemudian menjadi dasar dari praktik pemberian *fief* (tanah) kepada *vassal*, yang akan memberi imbal balik berupa pelayanan militer (Ganshof, 1996).

Hubungan ini bersifat pribadi dan didasarkan pada ikatan kepercayaan, yang disebut *commendatio*, di mana seorang vassal bersumpah setia kepadanya. Seiring waktu, hubungan ini menjadi dasar sistem politik di seluruh Eropa Barat.

3. Puncak Perkembangan Feodalisme

Pada abad ke-11 hingga 13, feodalisme mencapai puncaknya di Eropa Barat, khususnya di Prancis, Inggris, dan Jerman. Di Inggris, setelah Penaklukan Norman tahun 1066 oleh William the Conqueror, sistem feodal secara resmi diorganisasi dan diterapkan secara menyeluruh. Raja membagikan tanah kepada para baron, yang selanjutnya memberikannya kepada para kesatria. Struktur ini menciptakan hierarki sosial yang sangat kuat dan mengikat (Brown, 1998).

Pada masa ini, sistem feodal menjadi cara utama pengaturan hubungan sosial dan ekonomi. Tuan tanah memiliki hak untuk mengelola tanah dan memungut pajak dari para petani. Para petani, khususnya *serf*, tidak memiliki kebebasan untuk meninggalkan tanah tanpa izin tuannya.

Gereja Katolik juga memainkan peran besar dalam mendukung sistem ini. Dengan memiliki tanah dalam jumlah besar dan mempengaruhi legitimasi kekuasaan, Gereja menjadi bagian penting dalam struktur feodal (Tierney & Painter, 1992).

4. Karakteristik Perkembangan Regional

- a. Prancis: Merupakan tempat kelahiran feodalisme klasik. Raja memiliki kekuasaan terbatas, dan kekuasaan lokal sangat dominan di tangan para bangsawan. Muncul banyak *dukedom* dan *countship* yang semi-independen.
- b. Jerman: Kekuasaan Kaisar Romawi Suci hanya nominal. Para penguasa lokal, seperti adipati dan pangeran, memiliki kemandirian tinggi.
- c. Inggris: Setelah Penaklukan Norman, sistem feodal menjadi sangat terstruktur dan dikontrol langsung oleh raja. Hal ini membuat kekuasaan raja Inggris lebih kuat dibandingkan dengan di Prancis atau Jerman.
- d. Italia dan Spanyol: Meskipun sistem feodal juga ada, pengaruh kota-kota dagang dan budaya Romawi-Kristen menyebabkan perkembangan yang sedikit berbeda. Di Italia Utara, banyak kota berkembang menjadi republik otonom.

5. Faktor Pendukung Perkembangan Feodalisme

- a. Ketiadaan kekuasaan pusat yang kuat setelah runtuhnya Romawi.
- b. Kebutuhan akan perlindungan dari invasi dan kejahatan lokal.

- c. Struktur sosial yang kaku yang memudahkan pengorganisasian masyarakat secara hierarkis.
- d. Pengaruh Gereja Katolik, yang mendukung status quo dan struktur hierarkis.
- e. Ketergantungan pada pertanian, yang menjadikan tanah sebagai sumber kekuasaan dan kekayaan utama (Hilton, 1973).

6. Masa Akhir dan Kemunduran Feodalisme

Feodalisme mulai melemah pada abad ke-14 hingga 15, karena beberapa faktor:

- a. Kebangkitan perdagangan dan kota-kota menggeser kekuasaan dari tuan tanah ke kaum borjuis.
- b. Wabah Black Death (1347–1351) menyebabkan berkurangnya populasi petani, sehingga mereka memiliki posisi tawar lebih kuat.
- c. Munculnya monarki absolut dan negara-bangsa yang kuat (seperti Prancis dan Inggris) menggantikan sistem kekuasaan lokal.
- d. Revolusi pertanian dan teknologi, seperti bajak besi dan penggunaan cincir air, meningkatkan efisiensi pertanian dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang tidak tergantung pada sistem feodal.
- e. Perkembangan hukum dan birokrasi nasional yang mengurangi peran bangsawan lokal (Bloch, 1961).

Perkembangan feodalisme di Eropa Barat adalah respon terhadap kebutuhan akan stabilitas dalam masyarakat yang dilanda kekacauan setelah keruntuhan Romawi. Sistem ini berkembang secara dinamis, membentuk struktur sosial dan politik yang kuat, tetapi juga sangat tidak fleksibel. Meski pada awalnya memberikan ketertiban, sistem ini akhirnya menjadi penghambat perubahan sosial dan ekonomi sehingga harus tergantikan oleh sistem yang lebih modern seiring dengan transformasi Eropa menuju Renaisans dan negara modern.

D. DAMPAK FEODALISME TERHADAP KEHIDUPAN MASYARAKAT

Feodalisme sebagai sistem sosial dan ekonomi yang dominan di Eropa Barat pada Abad Pertengahan membawa pengaruh yang luas terhadap kehidupan masyarakat dalam berbagai aspek. Dampak tersebut dapat dilihat dari sisi sosial, ekonomi, politik, serta budaya. Meskipun feodalisme memberikan stabilitas pada masa kekacauan pasca-runtuhnya Kekaisaran Romawi Barat, sistem ini juga menyebabkan keterbatasan dan stagnasi di sejumlah bidang kehidupan masyarakat.

1. Dampak Sosial

Feodalisme menciptakan struktur sosial yang kaku dan hierarkis. Masyarakat terbagi dalam kelas-kelas sosial yang hampir tidak mungkin diubah:

- a. Kelas Bangsawan (nobility) terdiri dari raja, para adipati, baron, dan ksatria yang memiliki tanah dan kekuasaan.
- b. Kelas bawah, termasuk petani, buruh tani (serf), dan budak, menjadi kelompok yang paling menderita karena mereka terikat pada tanah dan hak kepemilikan dan kebebasan bergerak.

Sistem ini menumbuhkan kesenjangan sosial yang sangat dalam antara kelas atas dan bawah. Mobilitas sosial hampir tidak ada karena status seseorang ditentukan sejak lahir (Bloch, 1961). Kaum serf tidak memiliki kesempatan untuk meningkatkan taraf hidup mereka dan terikat pada tuannya seumur hidup.

2. Dampak Ekonomi

Dalam sistem feodalisme, ekonomi berputar di sekitar pertanian subsisten dan sistem barter. Tanah menjadi sumber kekayaan utama dan satu-satunya ukuran kekuasaan. Para bangsawan menerima hasil kerja para petani dalam bentuk pangan, ternak, atau kerja paksa (*corvée*), bukan uang (Hilton, 1973).

Konsekuensinya:

- a. Perdagangan dan inovasi terhambat, karena mayoritas masyarakat hidup untuk memenuhi kebutuhan sendiri.
- b. Sistem pajak tidak merata, karena petani harus menyerahkan sebagian besar hasil panen mereka kepada tuan tanah, sementara bangsawan tidak membayar pajak kepada raja.
- c. Ketergantungan pada kerja paksa menyebabkan produktivitas rendah dan inovasi teknologi terhambat.

3. Dampak Politik

Feodalisme memecah kekuasaan politik ke dalam wilayah-wilayah kecil yang dikendalikan oleh para bangsawan. Hubungan antara raja dan para vasal bersifat personal, bukan administratif. Akibatnya:

- a. Kekuasaan raja menjadi lemah dan bergantung pada kesetiaan para bangsawan.
- b. Muncul kerajaan-keajaan kecil atau kadipaten yang semi-independen dan sulit dikontrol oleh kekuasaan pusat.

- c. Terjadinyabanyakkonflikantarbangsawan, karenaperebutantanah, wilayah, dan kekuasaan sering terjadi, bahkan menimbulkan perang saudara di beberapa kerajaan (Ganshof, 1996).

4. Dampak Budaya dan Pendidikan

Feodalisme juga membawapengaruh terhadap aspek budaya:

- a. Kebudayaan didominasi oleh gereja dan bangsawan. Rakyat jelata tidak memiliki akses terhadap pendidikan atas seni.
- b. Pendidikan hanya tersedia di biara atau lingkungan gereja, dan hampir seluruh ilmu pengetahuan terpusat di sana.
- c. Literasi sangat rendah di kalangan rakyat, karena tidak ada kebutuhan maupun kesempatan untuk belajar membaca atau menulis.
- d. Budaya masyarakat didasarkan pada nilai-nilai kesetiaan, kehormatan, dan subordinasi, yang diperkuat oleh pengaruh gereja dan kode etik ksatria (*chivalry*).

5. Dampak terhadap Peran Gereja

Feodalisme sangat memperkuat peran Gereja Katolik:

- a. Gereja menjadi tuan tanah besar yang memiliki wilayah luas, menjadikannya salah satu pemilik tanah terbesar di Eropa.
- b. Otoritas spiritual Gereja turut memengaruhi urusan politik dan sosial, bahkan sering kali lebih kuat daripada kekuasaan raja.
- c. Gereja mendukung sistem hierarki sosial dan menjadipenopang ideologi dari sistem feodal, mengajarkan bahwa posisi sosial adalah bagian dari "rencana Tuhan" dan tidak boleh dilanggar (Tierney & Painter, 1992).

6. Dampak Psikologis dan Moral

Feodalisme juga berdampak pada mentalitas masyarakat:

- a. Kaum bawah merasataktidakberdaya dan tunduk pada otoritas atas.
- b. Rasa kebergantungan dan ketakutan terhadap tuan tanah menjadikan masyarakat tidak kritis dan pasif.
- c. Kehidupan yang monoton dan penuh kerja keras membuat banyak rakyat tidak punya waktu atau kemampuan untuk berpikirtentang perubahan sosial.

Feodalisme memberikan stabilitas politik dan struktur sosial yang jelas pada masa yang penuh kekacauan, tetapi di sisi lain menciptakan ketimpangan sosial yang besar dan membatasi perkembangan ekonomi, politik, sertabudaya masyarakat.

Sistem ini menguntungkan kelas bangsawan dan gereja, namun merugikan kelas bawah yang menjadi tulang punggung ekonomi agraris Eropa.

Dampak jangka panjangnya adalah terhambatnya kemajuan Eropa hingga akhirnya sistem ini digantikan oleh munculnya negara nasional, kebangkitan kota dagang, dan revolusi industri.

BAB III

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sistem feodalisme merupakan struktur sosial, ekonomi, dan politik yang mendominasi Eropa Barat selama Abad Pertengahan, khususnya pascaruntuhnya Kekaisaran Romawi Barat. Feodalisme dibangun atas dasar kepemilikan tanah oleh kaum bangsawan dan ketergantungan para petani terhadap perlindungan serta kehidupan dari tuan tanah. Dalam sistem ini, masyarakat dibagi secara kaku ke dalam kelas-kelas sosial yang ditentukan sejak lahir, menjadikan mobilitas sosial hampir mustahil.

Feodalisme berkembang pesat sebagai respon terhadap kebutuhan akan stabilitas di tengah ancaman invasi dan kekacauan politik. Raja sebagai pemilik kekuasaan tertinggi sering kali hanya simbolik, sementara para bangsawan lokal memiliki otonomi besar atas wilayahnya. Sistem ini diperkuat oleh institusi Gereja Katolik yang mendukung tatanan sosial feodal dan mengukuhkannya melalui pengaruh spiritual.

Ciri khas kerajaan feodal antara lain adalah pembagian kekuasaan berbasis tanah, hubungan timbal balik antara tuan dan vasal, struktur hierarki yang tegas, serta ketergantungan besar masyarakat kepada bangsawan.

Feodalisme membawa berbagai dampak terhadap kehidupan masyarakat, termasuk ketimpangan sosial, stagnasi **ekonomi**, melemahnya kekuasaan pusat, rendahnya tingkat pendidikan, dan dominasi ideologi gereja.

Pada akhirnya, meskipun feodalisme memberikan ketertiban dalam masa transisi, sistem ini menjadi penghambat kemajuan hingga terjadinya perubahan besar seperti kebangkitan kota, reformasi gereja, dan revolusi industri yang menandai berakhirnya dominasi feodal di Eropa.

B. SARAN

Perlu adanya kajian lanjutan mengenai perbandingan sistem feodal Eropa dengan sistem sosial serupa di kawasan lain seperti Jepang, untuk memperkaya perspektif historis global.

DAFTAR PUSTAKA

- Darmawan, D. (2017). *Sistem Feodalisme di Eropa Barat Abad Pertengahan*. Diakses dari https://www.academia.edu/35528946/Sistem_Feodalisme_di_Eropa_Barat_Abad_Pertengahan
- Handayani, R. (2020). *Feodalisme: Pengertian, Sejarah, dan Ciri-Cirinya*. Diakses dari <https://www.kompas.com/skola/read/2020/12/07/100000169/feodalisme--pengertian-sejarah-dan-ciri-cirinya>
- Kurniawan, A. (2021). *Sistem Feodalisme di Eropa dan Pengaruhnya terhadap Masyarakat*. Diakses dari <https://www.gramedia.com/literasi/sistem-feodalisme-di-eropa/>
- Rizki, A. (2022). *Perkembangan Sistem Feodalisme di Eropa pada Abad Pertengahan*. Diakses dari <https://tirto.id/perkembangan-sistem-feodalisme-di-eropa-abad-pertengahan-gjvL>
- Saputra, D. (2019). *Ciri-ciri dan Dampak Sistem Feodal di Eropa*. Diakses dari <https://www.sejarahnegara.com/ciri-dan-dampak-sistem-feodal-di-eropa/>